The COP28 Controversy and Its Impact on Indonesia as a Developing Country

Frequency of International Relations
September, Vol 7 (2) 81 - 104
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : August 02, 2015
Accepted : September 29, 2025
Available On-line : April 20 2026

Rafi Ali Zahid Habibullah
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Padjadjaran University
zahid@unpad.ac.id

Abstract
The The COP28 conference is a multilateral forum that brings together nearly 200 countries to respond to the urgency of the global climate crisis through a shared commitment to the transition from fossil fuels to environmentally friendly energy. In this conference, Indonesia not only acts as an active participant, but also as a representative of developing countries that face challenges in implementing the energy transition. Even though it is an important country in COP28, Indonesia's position as a developing country at this conference means that Indonesia remains one of the countries that is likely to be affected by a number of controversies behind the existence of COP28, especially exploitation planned by the host and developing countries that are participants. This research aims to understand Indonesia's contribution to COP28, the controversy that occurred at this conference, and the impact of the existing controversy on Indonesia as a developing country.

Keywords: ***COP28, climate diplomacy, Indonesia, climate change***

Pendahuluan

COP28 merupakan kependekan dari Conference of the Parties ke-28 dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Konferensi ini merupakan ajang pertemuan iklim internasional tahunan yang dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari organisasi-organisasi internasional hingga masyarakat adat, untuk bernegosiasi dan menyepakati tindakan untuk mengatasi isu perubahan iklim. Konferensi ini berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, dari tanggal 30 November hingga 12 atau 13 Desember 2023, di Expo City,, dengan jumlah peserta sekitar 85.000 orang.

Salah satu sorotan penting di COP28 yaitu perluasan dan peningkatan energi terbarukan dan efisiensi energi. Menyadari perlunya transisi energi yang komprehensif, negara-negara partisipan berkomitmen untuk mencapai tujuan untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan global dan menggandakan peningkatan efisiensi energi pada tahun 2030.

Hasil utama dari konferensi ini adalah kesepakatan untuk "beralih dari bahan bakar fosil" sebagai bagian dari inventarisasi global, yang merupakan naskah COP pertama yang menyebutkan pergeseran global untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil.

Sebagai bagian dari upaya global untuk mengatasi krisis iklim, Indonesia turut berpartisipasi dalam Conference of the Parties ke-28 (COP28) di bawah naungan UNFCCC. Pemerintah Indonesia mengklaim telah berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 60% dan memperbarui target kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dengan tujuan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,8%. Komitmen lainnya mencakup penguatan studi ekosistem, penerapan solusi berbasis alam, serta kelanjutan penurunan emisi dan pengendalian deforestasi. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan mitra internasional. Namun, komitmen ini juga menimbulkan pertanyaan: akankah posisi Indonesia dalam konvensi iklim ini membawa negara lebih dekat dengan blok negara maju yang memiliki kapasitas teknologi dan pendanaan lebih besar, atau tetap selaras dengan negara berkembang yang memiliki tantangan struktural serupa dalam menghadapi krisis iklim?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah studi pustaka atau *library research*. Beberapa metode yang digunakan adalah artikel juga kajian akademik yang terkini juga relevan dengan tema yang diangkat, referensi yang digunakan pada penelitian ini juga akan

dicantumkan, juga pencarian terhadap penulis atau pemikir yang terkait dengan temanya.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Marxisme yang mengarah pada bidang enviromentalisme atau lingkungan. Kesalahpahaman yang sering terdapat pada pandangan Marxisme adalah ketidakpedulian terhadap bidang lingkungan. Hal ini bisa dipahami karena banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Uni Soviet, Blok Timur, juga Cina sepanjang sejarah. Berbanding terbalik dengan pandangan umum terhadap Marxisme, tokoh-tokoh pencetus teori ini sendiri memiliki pandangan yang jauh lebih holistik terhadap tempat umat manusia di dalam bidang lingkungan itu sendiri . Karl Marx dan Frederick Engels, tokoh-tokoh pemikir teori Marxisme, seringkali diinterpretasikan terobsesi terhadap kondisi kelas pekerja (Williams, 2010).

Engels sudah mengingatkan melalui tulisannya untuk berhati-hati bahwa manusia sama sekali tidak menguasai alam seperti menaklukkan orang asing, seperti seseorang yang berdiri di luar alam tetapi bahwa kita sebagai umat manusia, dengan daging, darah, dan otak, adalah milik alam, hidup di tengah-tengahnya, dan bahwa semua penguasaan kita atasnya terdiri dari fakta bahwa kita memiliki keuntungan dari semua makhluk lain untuk dapat mempelajari hukum-hukumnya dan menerapkannya dengan benar.

Peringatan Engels tercerminkan pada masa sekarang di mana kehidupan dan biodiversitas telah berevolusi sampai planet ini memanas dan tidak bisa berpacu dengan perkembangan peradaban manusia. Bukan hanya perubahan iklim drastis yang menjadi sebuah ancaman bagi umat manusia nantinya, tetapi kecepatan dari perubahan itu sendiri. Biodiversitas yang tadinya berkembang menjadi berkurang seiring dengan kesejahteraan umat manusia yang menurun. Migrasi massa, banjir, kekeringan, perang, juga kelaparan akan menjadi sebuah ancaman endemik bagi seluruh dunia juga masyarakat. Hal-hal ini disebabkan oleh umat manusia yang terus menerus mengeruk dan mengambil dari alam, salah satu tindakan yang dilakukan adalah eksploitasi yang terus menerus.

Eksploitasi yang dilakukan tidak hanya antara manusia dengan alam, tetapi telah melebar sampai eksploitasi yang dilakukan oleh negara maju ke negara berkembang. Teori Marxisme memandang ini sebagai hasil dari sistem ekonomi kapitalisme yang masih diaplikasikan di kancah internasional. Sistem ini juga telah mengalienasi manusia dari alam dengan memprivatisasi daratan dan membuat segala produk menjadi komoditi, bahkan polusi yang dihasilkan itu sendiri (Williams, 2010). Hubungan antara negara maju dan negara berkembang di dalam sistem yang kapitalis menyebabkan negara berkembang yang berperan sebagai negara pekerja atau, dalam

kata-kata Marx, petani, dan negara maju sebagai industri yang menggerakkan negara-negara berkembang.

Hasil

Konferensi COP28 melahirkan sejumlah kesepakatan yang mencerminkan betapa perlunya keturutsertaan komunitas internasional terhadap isu krisis iklim yang kian mendesak. Di antaranya yaitu konsensus di antara hampir 200 negara untuk secara bertahap beralih dari bahan bakar fosil dalam sistem energi secara teratur dan merata, dengan tujuan mencapai emisi nol pada tahun 2050. Perjanjian ini menandai pertama kalinya dalam sejarah COP bahwa bahan bakar fosil secara eksplisit diakui sebagai penyebab utama perubahan iklim (Bourzac, 2024). Beriringan dengan itu, 50 perusahaan minyak dan gas besar, yang mencakup hampir setengah dari produksi bahan bakar fosil global, berkomitmen untuk mencapai emisi metana yang mendekati nol dari produksi gas alam pada tahun 2030 (AP News, 2023).

Joint Statement on Climate, Nature, and People, sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh UNFCCC, menekankan integrasi upaya mitigasi, adaptasi, dan konservasi keanekaragaman hayati

dengan menyelaraskan tiga instrumen kebijakan nasional inti: Nationally Determined Contributions (NDC), National Adaptation

Plans (NAP), dan National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAP).

Di sektor energi terbarukan, 123 negara menyetujui sebuah komitmen global untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan global menjadi setidaknya 11.000 GW pada tahun 2030, serta meningkatkan tingkat peningkatan efisiensi energi tahunan global dari sekitar 2% menjadi lebih dari 4% pada tahun yang sama. Negara-negara yang menandatangani ikrar tersebut juga sepakat untuk merevisi Nationally Determined Contributions (NDC) mereka agar selaras dengan tujuan-tujuan ini dan mengintegrasikannya ke dalam strategi iklim nasional mereka (Acen, et al., 2024).

COP28 juga menandai operasionalisasi resmi dari Loss and Damage Fund yang bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang paling rentan terhadap bencana terkait iklim. Dana ini menerima janji awal sebesar $792 juta, dengan kontribusi utama dari Uni Emirat Arab dan Jerman (masing-masing sebesar $100 juta), Inggris (£40 juta), Amerika Serikat ($17,5 juta), dan Jepang ($10 juta) (Health, 2024). Meskipun demikian, jumlah ini masih jauh dari perkiraan $290-580 miliar per tahun yang dibutuhkan pada tahun 2030 untuk mengatasi kerugian dan kerusakan akibat iklim di negara-negara berkembang (Darby, 2024).

Indonesia sendiri telah menunjukkan sejumlah pencapaian penting dalam implementasi hasil perjanjian COP28, khususnya dalam sektor kehutanan dan konservasi laut. Berdasarkan laporan World Resources Institute, Indonesia berhasil menurunkan kehilangan hutan primer sebesar 65% sejak 2015. Keberhasilan ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah seperti moratorium izin baru di kawasan hutan primer dan gambut, restorasi ekosistem gambut, serta penguatan sistem pencegahan kebakaran hutan. Sebagai bentuk pengakuan atas capaian tersebut, Indonesia menerima kontribusi pendanaan sebesar USD 100 juta dari Norwegia dalam skema *results-based payment*, serta menjalin kerja sama trilateral pengelolaan hutan tropis dengan Brasil dan Republik Demokratik Kongo (Indonesia Business Post, 2023). Selain itu, Indonesia juga memperkuat strategi mitigasi iklim di wilayah pesisir melalui perlindungan dan rehabilitasi padang lamun sebagai bagian dari inisiatif *Seagrass Blue Carbon Mitigation Action Profile* (Indonesia Palm Oil Facts, 2023).

Dalam sektor energi, Indonesia telah mempensiunkan 660 Megawatt pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai bagian dari komitmen transisi energi dalam kerangka *Just Energy Transition Partnership* (JETP), meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pendanaan dan infrastruktur. Indonesia juga telah memperbarui target kontribusi nasional (NDC) dalam Paris Agreement

dengan komitmen penurunan emisi 31,8% secara mandiri, serta hingga 60% dengan dukungan internasional, terutama melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Program *FoLU Net Sink 2030* yang merupakan strategi nasional andalan juga terus dijalankan dan diklaim akan memainkan peran penting dalam pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat (Insivia Partners, 2025).

Di COP28, Indonesia turut menjalin berbagai kolaborasi strategis, termasuk kerja sama antara Pertamina New & Renewable Energy (NRE) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang fokus pada solusi berbasis alam dan ekosistem (NEBS). Kolaborasi ini mencakup proyek mitigasi kebakaran hutan, karbon biru, restorasi, dan konservasi hutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Proyek unggulan mereka, *Nusantara Forest Carbon Project*, ditargetkan untuk mendukung status Net Zero City di IKN (Indonesia Business Post, 2023). Secara keseluruhan, pendekatan Indonesia menunjukkan keterpaduan antara aksi mitigasi berbasis alam, kolaborasi internasional, dan integrasi transisi energi ke dalam agenda pembangunan nasional.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan terkait konsistensi dan komitmen kebijakan energi domestik Indonesia pasca-COP28. Salah satu sorotan utama adalah keputusan Indonesia untuk tidak

menandatangani deklarasi global tentang energi terbarukan dan efisiensi energi di COP28, yang menimbulkan keraguan terhadap keseriusan pencapaian target NZE. Selain itu, draf revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang sedang dibahas menurunkan target bauran energi terbarukan dari 23% menjadi 17–19% pada 2025, dan dari 26% menjadi 19–21% pada 2030, menunjukkan potensi pelemahan komitmen transisi energi nasional. Hingga 2023, bauran energi terbarukan Indonesia baru mencapai 13,1%, masih jauh dari target tahunan sebesar 17,9% (IEEFA, 2024).

Transisi energi di Indonesia menuju target emisi nol bersih (net-zero emissions/NZE) pada tahun 2060 menghadapi tantangan struktural yang kompleks, terutama karena ketergantungan tinggi terhadap batu bara. Hingga tahun 2021, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara menyumbang sekitar 61% dari total pembangkitan listrik nasional dan menjadi sumber emisi terbesar kedua setelah deforestasi, dengan kontribusi sekitar 35% dari total emisi pada tahun 2020. Meskipun pemerintah telah meluncurkan inisiatif seperti *Energy Transition Mechanism* dan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) untuk mempercepat pensiun dini PLTU, insentif ekonomi yang kuat dari batu bara, termasuk keuntungan biaya rendah dan kontribusinya terhadap pendapatan negara, masih menjadi penghambat utama dalam transisi menuju energi bersih.

Di sisi lain, energi terbarukan masih menyumbang kurang dari 10% dari konsumsi energi nasional, padahal pemerintah menargetkan pengurangan emisi sebesar 43,2% pada 2030. Estimasi kebutuhan pendanaan untuk transisi ini sangat besar, berkisar antara Rp 3.500 triliun hingga USD 3,5 triliun. Meskipun terdapat langkah seperti implementasi *Emissions Trading System* (ETS) untuk PLTU, efektivitasnya dalam mengurangi ketergantungan pada batu bara masih belum terbukti secara signifikan. Oleh karena itu, mengatasi ketergantungan struktural terhadap batu bara melalui reformasi kebijakan, pembiayaan inovatif, dan penguatan regulasi menjadi syarat mutlak untuk mencapai komitmen iklim Indonesia secara konkret (Resosudarmo, et al., 2023).

Situasi inilah yang menjadi latar belakang kehati-hatian Indonesia dalam merespons kesepakatan global di COP28. Dalam perumusan hasil konferensi, Indonesia tidak memberikan dukungan penuh terhadap seruan penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara cepat (*phasing out*), dan lebih mendorong pendekatan yang bertahap serta mempertimbangkan kondisi dan kapasitas nasional masing-masing negara. Pemerintah menyampaikan bahwa transisi energi perlu dilakukan secara adil dan inklusif, sejalan dengan kesiapan infrastruktur, ketersediaan pendanaan, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi domestik (Putri, et al., 2025).

Hal ini sangat berkaitan dengan fakta bahwa batu bara masih memegang peran dominan dalam sektor energi nasional. Menurut data dari Kementerian Perhubungan (2022), sektor transportasi menyumbang lebih dari 25% dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia, yang Sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin dan solar. Sektor energi di Indonesia sangat bergantung pada bahan bakar fosil, lebih dari 85% pasokan energi primer Indonesia berasal dari bahan bakar fosil. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2022), batu bara tetap menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik di Indonesia, dengan lebih dari 60% dari produksi listrik Indonesia.

Sebagai kelanjutan dari kebutuhan transisi energi yang bertahap dan kontekstual, penting untuk dicermati bahwa pergeseran menuju energi bersih tidak hanya merupakan kewajiban ekologis, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Potensi transisi energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat besar, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja hijau secara global yang diperkirakan mencapai 38,2 juta pekerjaan pada tahun 2030, serta peningkatan kualitas kesehatan akibat penurunan emisi polutan udara. Selain itu, biaya energi terbarukan menunjukkan tren penurunan yang drastis. Sejak 2010, biaya produksi listrik tenaga surya telah turun lebih dari 85%,

sementara biaya pembangkitan listrik tenaga angin darat turun lebih dari 56%, menjadikannya semakin kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil. Lebih lanjut, transisi energi global memerlukan investasi sebesar USD 4,5 triliun per tahun hingga 2030, namun investasi ini bukanlah beban semata, melainkan peluang ekonomi jangka panjang (Yu, et al., 2024). Negara-negara yang lebih awal membangun infrastruktur energi bersih dan mendukung teknologi rendah karbon berpotensi memperoleh keunggulan kompetitif dalam rantai nilai energi global, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil.

Namun, di tengah potensi transisi energi sebagai peluang ekonomi global, dinamika geopolitik dan kepentingan korporasi masih menjadi tantangan tersendiri dalam upaya dekarbonisasi. Hal ini tercermin dari kontroversi yang muncul di COP28, ketika muncul laporan bocoran dokumen yang menunjukkan keterlibatan kepentingan industri minyak dalam proses negosiasi konferensi. Pada bulan November 2023, CCR membocorkan dokumen bahwa Uni Emirat Arab, beserta pemimpin COP yang juga CEO Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Sultan Al Jaber, mempunyai rencana untuk memanfaatkan pertemuan terkait COP28 untuk mempromosikan kesepakatan bisnis minyak dan gas nasionalnya. Dokumen yang dibocorkan pada Centre for Climate Reporting (CCR) adalah dokumen

lebih dari 150 halaman, memuat semua catatan briefing meeting yang diselenggarakan tim COP28 dengan Al Jaber dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2023. CCR bekerjasama dengan BBC untuk memverifikasi kebenaran dokumen ini, beserta dengan pembocor informasinya, yang membocorkan informasi mengenai dokumen ini secara anonim. Selain pembocoran dokumen ini, CCR juga mendapat informasi terkait e-mail internal dan rekaman pertemuan tim COP28 dengan ADNOC.

Tentunya, tim COP28 mendapatkan konfrontasi mengenai catatan meeting dan dokumen yang CCR dan BBC dapatkan. Tim COP28 membantah konfrontasi ini, mengatakan bahwa "staf COP28 adalah entitas yang terpisah dari entitas lain", dan "presiden (dari COP28) beroperasi secara independen". Selain itu, COP28 juga mengkritik BBC dalam menggunakan informasi yang "tidak akurat" dan "tidak terverifikasi kebenarannya". Tetapi, bocoran yang ada berkata lain.

Sejumlah figur ternama mengomentari kontroversi ini. Michael Jacobs, seorang profesor dari Sheffield University, yang merupakan pakar politik iklim, menyatakan bahwa tindakan Al Jabar "hipokritikal". Ia berkata bahwa, presiden COP tidak seharusnya mendorong kepentingan nasional atau komersil, dan seharusnya forum internasional ini dipakai untuk kepentingan bersama. Presiden COP

sebelumnya juga menyatakan dalam negosiasi iklim UN bahwa pemimpin COP seharusnya sama sekali tidak boleh membawa kepentingan nasional.

Selain dokumen COP28 yang bocor, ada juga kontroversi lain: lobi industri bahan bakar fosil. COP28 memuat lebih banyak pelobi industri bahan bakar fosil daripada konferensi COP sebelumnya. Lebih dari 2000 delegasi hadir di lobi industri bahan bakar fosil COP28, gabungan dari 10 negara paling rentan iklim. Banyak pelobi ini berasal dari negara-negara maju atau perusahaan multinasional yang besar, dan mereka diduga mendorong agenda-agenda yang menguntungkan kepentingan negara-negara sendiri, negara penghasil dan pengguna bahan bakar fosil, dan negara-negara ini tidak jarang mengorbankan kepentingan negara-negara rentan dan berkembang. Lobi ini memunculkan kekhawatiran bahwa negosiasi-negosiasi yang terjadi di COP28 akan lebih menguntungkan negara-negara kaya dan perusahaan besar, daripada membantu negara yang terdampak perubahan iklim.

Diskusi dan Analisis

Dalam teori Marxisme, posisi Indonesia sebagai negara berkembang dalam COP28 mencerminkan ketimpangan struktural yang berakar pada sistem kapitalisme global. Meskipun COP28 digagas sebagai forum multilateral untuk menangani krisis iklim secara

kolektif, kenyataannya perbedaan kapasitas antara negara maju dan berkembang tetap sangat nyata. Indonesia, yang dalam forum ini tampil aktif dengan komitmen pengurangan emisi karbon sebesar 60% dan target Nationally Determined Contribution (NDC) baru sebesar 31,8%, masih sangat bergantung pada pendanaan dan transfer teknologi dari negara-negara maju.

Penolakan Indonesia pada COP28 juga pemaparan isi draf revisi KEN telah mencerminkan ketidaksanggupan Indonesia sebagai sebuah negara untuk turut melanjutkan gerakan transisi energi. Hal ini memperlihatkan bagaimana negara berkembang seperti Indonesia ditempatkan dalam posisi subordinat dalam sistem ekonomi lingkungan global, di mana mereka diminta berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang sebagian besar disebabkan oleh industrialisasi negara-negara maju, namun tidak mendapatkan akses proporsional terhadap sumber daya penyelesaiannya. Didukung dengan data yang dibocorkan oleh CCR, tokoh-tokoh elite global seperti Uni Emirat Arab juga pemimpin COP telah memanfaatkan negara berkembang seperti Indonesia, yang masih bergantung kepada batu bara sebagai sumber pemasukan, untuk terus bergantung kepada negara maju.

Marxisme menjelaskan dinamika ini sebagai hasil dari hubungan produksi global yang timpang, di mana negara-negara maju bertindak sebagai kelas borjuis global, memonopoli teknologi, modal, dan

keputusan politik internasional, sementara negara berkembang berperan sebagai proletariat internasional yang menjalankan beban produksi dan menerima dampak kerusakan lingkungan. Bahkan, inisiatif seperti *Loss and Damage Fund*, yang digagas untuk membantu negara-negara rentan menghadapi dampak iklim, hanya menjanjikan pendanaan sebesar $792 juta; jauh dari kebutuhan aktual sebesar $290–580 miliar per tahun yang diproyeksikan diperlukan pada 2030. Ini menunjukkan bagaimana sistem global kapitalistik mengelola krisis iklim dengan tetap mempertahankan struktur yang menguntungkan kelas kapitalis global, yakni negara-negara maju dan korporasi besar.

Para pemikir Marxisme telah sampai pada kesimpulan bahwa kapitalisme adalah dalang dari kerusakan alam yang telah terjadi di seluruh dunia (Ahmed, et al., 2023). Namun, dalam konteks ini, eksploitasi tidak hanya terjadi terhadap alam, tetapi juga terhadap negara-negara berkembang yang dijadikan pasar dan wilayah produksi energi bagi negara-negara maju. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara sebagai contohnya. Sementara itu, Indonesia sendiri masih memiliki banyak kendala dalam melakukan transisi energi, dari segi pendanaan juga target yang ditetapkan cukup tinggi bagi negara berkembang. Kedua hal ini menjadi contoh konkret bagaimana negara berkembang dikomodifikasi dalam sistem ini.

Marxisme memandang bahwa sistem kapitalis telah mengasingkan manusia dari alam dan menjadikan seluruh unsur kehidupan, termasuk udara bersih dan emisi karbon, sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Williams, 2010). Posisi dan peran Indonesia menggambarkan hal ini dengan baik. Indonesia dengan segala sumber daya alamnya, telah memperjualbelikan batu baranya sebagai sebuah sumber penghasilan yang cukup besar. Namun, tempatnya sebagai negara berkembang telah menghalanginya dalam bergerak ke sebuah negara yang dapat lebih bermanfaat kepada alam. Indonesia menjadi bergantung kepada penghasilan dan investasi terhadap batu bara sampai target dari penggunaan dan pembangunan energi terbarukan tidak tercapai. Di satu sisi, Indonesia terlihat ambisius dalam menghadapi transisi energi juga konservasi lingkungan, namun tidak memiliki kesanggupan dari segi pendanaan untuk membuat target yang ditetapkan menjadi nyata. Menurut Williams (2010), jika kita menganut gaya hidup politik, maka kita akan dipersepsikan seperti apa yang diinginkan oleh elite korporat dan politik, yaitu sebagai konsumen daripada produsen. Maka dari itu, bisa dilihat bahwa Indonesia berada dalam posisi kelas ganda *(contradictory class position),* berperan sebagai negara pekerja dalam sistem global, namun sekaligus mencoba masuk dalam lingkaran elite dengan menegosiasikan peran sebagai pemimpin transisi energi. Dalam perspektif Marxis, ini bukanlah kemajuan menuju kesetaraan,

melainkan bentuk baru dari kooptasi negara berkembang ke dalam sistem kapitalisme hijau yang tetap menempatkan kepentingan negara maju sebagai pusat kekuasaan.

Sebagai negara yang berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki sebuah posisi yang bisa mengalami kenaikkan jika dimanfaatkan dan diregulasikan dengan baik. Ketergantungan Indonesia kepada batu bara sebagai sebuah komoditi bisa dijadikan sebuah titik kekuatan dari pada kelemahan. Indonesia membutuhkan regulasi alam yang ketat untuk memastikan bahwa negara ini mendapatkan apa yang pantas didapatkan setelah membuat sebuah kesepakatan dengan negara-negara maju yang berinvestasi dan membeli dari Indonesia.

Jika regulasi yang ketat bisa diterapkan, maka tempat Indonesia di sistem ekonomi global yang bergantung pada alam ini bisa berpindah dari sebuah konsumen menjadi sebuah produsen, di mana Indonesia tidak lagi bergantung pada satu sumber daya alam sebagai bahan bakar tetapi juga bisa turut mencapai target transisi energi. Regulasi yang menyatakan timbal balik yang sepadan juga bisa memberikan pendanaan yang cukup untuk perkembangan Indonesia lainnya dalam segi mengolah alam dan kembali memperbaikinya.

Kesimpulan

Konferensi COP28 menjadi simbol penting dari upaya global dalam menghadapi krisis iklim, dengan berbagai komitmen ambisius seperti transisi dari bahan bakar fosil, peningkatan kapasitas energi terbarukan, dan peluncuran dana. Meskipun begitu, dalam kerangka teori Marxisme, konferensi ini juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam kapitalisme global, Indonesia, sebagai negara berkembang, meski menunjukkan komitmen besar dalam pengurangan emisi dan perbaikan kebijakan iklim, tetap berada dalam posisi subordinat yang bergantung pada pendanaan dan teknologi dari negara-negara maju. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas krisis iklim tidak dibagi secara adil, dan beban terbesar tetap ditanggung oleh negara-negara yang paling rentan.

Keterlibatan aktor ekonomi besar dalam diplomasi iklim, seperti kasus Presiden COP28 yang juga menjabat CEO perusahaan minyak nasional, menyoroti bagaimana kepentingan kapitalis tetap mendominasi ruang negosiasi iklim global. Dalam konteks ini, konferensi iklim tidak hanya menjadi ajang diplomasi lingkungan, tetapi juga arena perebutan kepentingan ekonomi. Posisi Indonesia di COP28 menunjukkan kontradiksi antara peran sebagai negara yang terdampak dan negara yang turut mereproduksi sistem kapitalisme hijau. Dari perspektif Marxis, COP28 memperlihatkan bahwa tanpa

perubahan struktural terhadap sistem ekonomi global, solusi yang dihasilkan akan tetap berpihak pada kelas kapitalis global, sementara negara-negara berkembang hanya menjadi pelengkap dari agenda transisi yang ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik negara maju.

Daftar Pustaka

Acen, C., Bamisile, O., Cai, D., Ukwuoma, C. C., Obiora, S., Huang, Q., Ozsahin, D. U., & Adun, H. (2024). The complementary role of carbon dioxide removal: A catalyst for advancing the COP28 pledges towards the 1.5 °C Paris Agreement target. *The Science of the Total Environment*, *947*, 174302. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.20 24.174302

Ahmed, Z., Shah, M. A., & Saleem, M. (2023). THE IDEA OF ENVIRONMENT IN MARXIST PHILOSOPHY, XI(4).

Asif, M., Amin, N., Shabbir, M. S., & Song, A. (2024). Balancing growth and sustainability: COP 28 policy implications of green energy, industrialization, foreign direct investment, and globalization in South Asia. *Journal of Environmental Management*, *369*, 122290. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.20 24.122290

Bachtiar, R., & Andriana, V. (2024, January 19). *COP 28 key takeaways — ARMA Law*. ARMA Law.https://www.arma-law.com/news-eve nt/newsflash/newsflash/cop-28

Bourzac, K. (2024). COP28 makes it official: Fossil fuels cause climate change. *Engineering*, *37*, 3–5. https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.05 .001

Chopra, R., Rehman, M. A., Yadav, A., & Bhardwaj, S. (2024).

Revisiting the EKC framework concerning COP-28 carbon neutrality management: Evidence from Top-5 carbon embittering countries. *Journal of Environmental Management*, *356*, 120690. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.20 24.120690

COP28 talks open in Dubai with breakthrough deal on loss and damage fund. (2023, December 1). UN News. https://news.un.org/en/story/2023/11/ 1144162

Darby, S. J., Hammond, G. P., & Wu, J. (2024). Briefing: Stocktaking global warming: the outcomes of the 2023 Dubai Climate Summit (COP28). *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Energy*, *177*(5), 193–204. https://doi.org/10.1680/jener.24.0000 5

Engels, F. (2007). The Part Played by Labor in the Transition from Ape to Man," inThe Origin of the Family, Private Property and the State. New York: International Publishers.

Gambrell, J., Prengaman, P., & Borenstein, S. (2023, December 2). *At COP28 meeting, oil companies pledge to combat methane. Environmentalists call it a "smokescreen" | AP News*. AP News. https://apnews.com/article/climate-c hangemethanecop28-58c756d843fbc 696b28a330295505be7

Gulo, S. F. (2025, May 31). Kepentingan Nasional dan Moral Global:Dilema Indonesia di COP28 Dubai. *retizen.id*. https://retizen.republika.co.id/posts/5 28608/kepentingan-nasional-dan-mo ral-globaldilema-indonesia-di-cop28- dubai

Halimah. (2024, August 12). *COP28 dan Dampaknya pada Sektor Energi Indonesia - irid.or.id*. irid.or.id - Just Another WordPress Site. https://irid.or.id/publication/cop28-da n-dampaknya-pada-sektor-energi-ind onesia/

Hamilton, B., Vega, D., Kusdiana, D., Susandy, T., Szum,

C., Levinson, R., ... & Muehleisen, R. NET ZERO WORLD COP28 Outcomes Report.

Health, N. L. P. (2024). COP28 reflections. *The Lancet Planetary Health*, *8*(1), e1.

https://doi.org/10.1016/s2542-5196(2 3)00279-6

Indonesia secures climate collaborations at COP28, inking milestone agreements. (2023, December 4). Indonesia Business Post. https://indonesiabusinesspost.com/60 0/geopolitics-and-diplomacy/indones ia-secures-climate-collaborations-at- cop28-inking-milestone-agreements

Indonesia's Leadership in Climate Action at COP28. (2023, December 7). Indonesia Palm Oil Association.

NYU. (2025, April 18). *Research guides: Theater of the real: Library research methods*. Library Research Methods

- Theater of the Real - Research Guides at New York University. https://guides.nyu.edu/Documentary Theatre/research-methods

Putri, G. N. E., Molasy, H. D., & Soelistijiono, P. A. (2025). PENOLAKAN INDONESIA TERHADAP HASIL KESEPAKATAN CONFERENCE OF THE PARTIES (COP) 28. Jurnal Inovasi Hukum, 6(2).

Resosudarmo, B., Effendi, Y., & Rezki, J. (2023). Prospects of Energy Transition in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59, 149 -177. https://doi.org/10.1080/00074918.20 23.2238336.

Situmorang, T., Amin, M., & Ritonga, A. (2025). Indonesia's policy responses to climate change in sustainable natural resource management: Jokowi's tenure. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1445.

https://doi.org/10.1088/1755-1315/1 445/1/012063.

Tahira, I., & Athira, Y. (2025, March 21). *Looking at Climate Commitments after COP28 for Indonesia*. INSIVIA Partners.

https://insiviapartners.com/looking-a t-climate-commitments-after-cop28-f or-indonesia/

Tim Prohealth. (2025, February 15). *COP28 dan Ambiguitas Penanganan Masalah Lingkungan di Indonesia*. Prohealth.

https://prohealth.id/cop28-dan-ambig uitas-penanganan-masalah-lingkunga n-di-indonesia/

Waskow, D. (2023, November 24). *Mengukur Keberhasilan COP28*. WRI Indonesia.

https://wri-indonesia.org/id/wawasan /mengukur-keberhasilan-cop28

Williams, C. (2010). *Marxism and the environment*. Marxism and the environment | International Socialist Review.

https://isreview.org/issue/72/marxism -and-environment/index.html.

Yu, H., Wen, B., Zahidi, I., Chow, M. F., Liang, D., & Madsen, D. Ø. (2024). *The critical role of energy transition in addressing climate change at COP28*. Results in Engineering, 22, 102324.

https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024 .102324

Yustika, M. (2024, February 13). *The dark cloud over Indonesia's pledge to achieve net-zero emissions by 2060*. Institute for Energy Economics and FinancialAnalysis.https://ieefa.org/resources/dark-cloud -over-indonesias-pledge-achieve-net- zero-emissions-2060

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini